

## **BAB II**

### **DINAMIKA PERKEMBANGAN DIPLOMASI PUBLIK AMERIKA SERIKAT.**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai dinamika perkembangan diplomasi publik AS sejak awal dimulai hingga pada masa Presiden Barrack Obama. Pada bab 2 ini akan dibagi menjadi 3 sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai sejarah perkembangan diplomasi AS. Bagian pertama ini akan membahas sejarah diplomasi AS pada perang dunia I, perang dunia II dan perang dingin. Dimulai dari problematika, tujuan dan instrumen yang dipakai AS ketika menjalankan aktivitas diplomasi publiknya ketika perang dunia I, II dan perang dingin. Pada sub bab yang kedua, penulis menerangkan tentang diplomasi publik AS pada era Presiden George W. Bush. Bagian ini menjelaskan naiknya presiden George W. Bush yang disambut dengan peristiwa 11 serangan teror bom pada 11 September 2001. Dengan peristiwa itu, Presiden George W. Bush berupaya memerangi kelompok terorisme yang merugikan AS.

Kemudian, sub bab ketiga akan membahas mengenai diplomasi publik AS pasca peristiwa 11 September 2001. Pada bagian ini dijelaskan mengenai dampak dari peristiwa 9/11 tersebut. Kemudian diplomasi yang digunakan untuk mengatasi peristiwa 9/11. Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai aktivitas diplomasi AS pasca peristiwa 9/11 dengan menggunakan teknologi berbasis media massa pada era Presiden George Bush sebagai upaya untuk memperbaiki citra AS akibat kebijakan yang dilakukan oleh Bush.

## **A. Sejarah Diplomasi Publik Amerika Serikat**

Diplomasi publik merupakan upaya suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional dan kebijakan luar negerinya dengan menggunakan berbagai instrumen yang didalamnya untuk memahami, memberikan informasi, serta mempengaruhi publik dengan tujuan masyarakat internasional dapat memberikan persepsi yang baik bagi suatu negara tersebut. Dalam diplomasi publik, suatu negara mempunyai tujuan dan kepentingannya masing- masing. Begitu pula Amerika Serikat, AS mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda- beda pada setiap masa atau periode kepemimpinan yang berbeda. Hal tersebut telah dilakukan dan dibuktikan oleh AS pada periode- periode sebelumnya. Mulai dari peristiwa perang dunia I, perang dunia II dan juga Perang dingin.

### **1. Diplomasi AS Massa Perang Dunia I**

Diplomasi publik AS pada perang dunia I diikuti dengan adanya perebutan kekuasaan untuk mendapatkan hegemoni terhadap negara- negara lain yang terjadi di wilayah eropa. Pertarungan kekuatan- kekuatan besar di eropa memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri AS. Pertarungan antar kedua kubu yakni Entente tiga (Britania Raya, Prancis, Rusia) dan Blok Sentral (Jerman, Austria- Hungaria, Italia) memiliki dampak terhadap AS baik itu ekonomi, militer dan politik. Dalam PD I AS lebih mengedepankan kepentingan perdamaian dan menghindari konflik yang terjadi di wilayah eropa dengan kebijakan non- intervensi dibawah Presiden Woodrow Wilson. Selain itu, AS juga tidak terlalu melibatkan diri pada politik luar negeri yang terjadi pada perang dunia I (Ariefyanto, 2013)

Namun sikap tersebut tidak bertahan lama. AS terlibat dalam perang dunia I terjadi pada bulan April 1917, setelah

upaya 2½ tahun oleh Presiden Woodrow Wilson untuk menjaga Amerika Serikat tetap netral. Presiden Woodrow Wilson mendeklarasikan AS untuk berperang melawan Jerman. Hal ini disebabkan Jerman telah melanggar janjinya untuk menunda perang kapal selam di Atlantik Utara dan Mediterania. Selain itu, penyebab AS menyatakan perang terhadap Jerman terjadi adanya Telegram Zimmerman yang tersebar dan berisi upaya Jerman untuk mengajak Meksiko terlibat dalam menyerang AS. Dengan imbalannya kepada Meksiko untuk mendanai perang Meksiko dan membantu untuk merebut kembali wilayah Texas, New Mexico, dan Arizona. (Tuchman, 1985) Telegram Zimmerman pun digunakan oleh Presiden Wilson untuk menyebarkan kepada masyarakat AS. Presiden Wilson menyerukan seluruh elemen- elemen anti perang untuk memenangkan perang ini. (Karp, 1979)

Sebelumnya AS juga telah memperingatkan Jerman untuk tidak menyerang kapal AS yang memuat pengiriman AS ke wilayah Eropa dan mengakibatkan kerugian ekonomi serta juga kematian banyak pelaut dan warga AS. AS juga mengumumkan bahwa ia telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Jerman. AS mengungkapkan bahwa perang di Eropa akan sangat merugikan perdagangan luar negerinya yang mana sebagian besar tergantung pada perdagangan dengan kawasan Atlantik (State U. D., 2009)

Untuk mendukung upaya AS dalam mewujudkan kepentingan dan juga tujuannya dalam perang dunia I, maka AS membentuk *Commite on Public Informaton*. Lembaga ini berfungsi mempengaruhi opini publik untuk mendukung partisipasi AS dalam Perang Dunia I. Presiden Woodrow Wilson mendirikan lembaga ini yang dipimpin oleh George Creel. Creel mulai menjangkau setiap warga Amerika dengan memberikan informasi tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam perang. Kemudian Creel mendirikan divisi agensi untuk mendistribusikan dan memproduksi pamflet, surat kabar, iklan majalah film, kampanye ke sekolah serta pidato dalam forum- forum umum. (Adams, 1999)

Selain itu terdapat divisi berita yang bertugas menempatkan materi dalam 20.000 kolom surat kabar setiap minggu selama perang. Divisi surat kabar juga memantau ratusan publikasi berbahasa asing di Amerika Serikat. Dimulai pada Mei 1917 dan berjalan hingga Maret 1919, CPI menerbitkan Buletin Resmi, dibagikan gratis kepada pejabat publik, surat kabar, kantor pos, dan agen-agen lainnya. Itu membawa pernyataan dari pemerintah dan memiliki sirkulasi sekitar 115.000. Selain itu CPI menerbitkan lebih dari 100 judul majalah yang mendefinisikan cita-cita Amerika dan menuduh militerisme Jerman serta mempromosikan perluasan kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri. Dan juga memberi tahu orang AS apa yang dapat mereka lakukan untuk mempercepat kemenangan. (Neumann, t.thn.)

Hanya dalam waktu 26 bulan, dari 14 April 1917, hingga 30 Juni 1919, CPI menggunakan setiap media yang tersedia untuk menciptakan antusiasme terhadap upaya perang dan untuk meminta dukungan publik terhadap upaya untuk menghentikan partisipasi AS dalam perang. Ini juga digunakan sebagai media propaganda untuk mencapai tujuannya. Dalam diplomasi publiknya, AS melakukan propaganda untuk mengalahkan Jerman pada perang dunia I. Serta mempengaruhi negara- negara yang terlibat dalam Perang untuk melakukan perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan Perjanjian Versailles yang merugikan Jerman. Perjanjian yang menuntut Jerman untuk bertanggung jawab serta melakukan ganti rugi biaya perang dunia I. (Mediaindonesia.com, 2015) Perjanjian Versailles merupakan awal dari pemebeentukan Liga Bangsa-bangsa yang diinisiasi oleh Presiden Wilson sebagai media penyelesaian permasalahan internasional dan menajalani hubungan dilomatik antar negara.

## **2. Diplomasi AS saat Perang Dunia II**

Diplomasi publik AS pada era perang dunia II memiliki karakteristik yang berbeda dengan era perang dunia I. Hal ini di latar belakang pada isu yang berkembang pada era PD II. Yang mana perebutan kekuasaan masih menjadi isu utama pada perang dunia II antara kedua blok yaitu blok sentral dan entente tiga. Namun, wilayah cakupannya menjadi semakin luas dan dapat mempengaruhi politik internasional dunia termasuk Asia. Yang dibuktikan masuknya Jepang pada PD II ini.

Keterlibatan AS pada perang dunia II sangat memunculkan perannya dalam membantu negara- negara sekutu untuk menghadapi Jerman. AS ingin menjadi pemain utama dalam perang dunia II dengan bergabung secara penuh dengan koalisi negara sekutu. Masuknya AS pada PD II sangat tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dilalui oleh Presiden Roosevelt untuk menyakinkan senat AS dan juga warga AS. Para senator AS dan juga warga AS banyak yang menentang sikap Presiden Roosevelt yang ingin keluar untuk melakukan perang di eropa. Hal ini melanggar UU Netralitas AS yang telah disahkan oleh para senator AS.

AS melakukan penolakan terhadap UU yang memberatkan AS untuk keluar melakukan perang. AS melakukan bantuan kepada Inggris dan Prancis dengan melakukan embargo senjata ke eropa. Sikap netral itu tidak menghalangi AS untuk berpartisipasi dalam melakukan penyerangan terhadap Jerman. Dengan memberikan segala bantuan kepada Inggris, AS mampu mendorong negara sekutu untuk tetap menyerang Jerman.

Penyerangan Jepang terhadap pangkalan militer AS di Pearl harbour, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941, membuat AS keluar dan melakukan penyerangan blok sentral. Hal itu dilakukan Jepang pada saat negosiasi antara AS dan Jepang untuk menghentikan ekspansi Jepang terhadap Wilayah Asia.

Akibat kejadian ini, Churchill menyampaikan pidatonya yang mendorong agar AS keluar dari perang untuk menjaga wilayahnya dan mengawasi Jepang. Pidato tersebut sangat terkenal dan menyebar di saluran radio AS. Seluruh warga AS yang mendengarnya terinspirasi dan mendukung AS untuk keluar dan melakukan perang.

Sehari setelah itu, AS mengumumkan untuk melakukan perang terhadap Jepang. Dan kemudian pada 11 Desember 1941, Jerman dan Italia mendeklarasikan perang terhadap AS. Perang ini bertujuan untuk menghentikan kemajuan Jerman di Uni Soviet dan Afrika Utara serta menghancurkan Jerman Nazi, menyelamatkan China dan mengalahkan Jepang. (State U. D., 2009)

Untuk mengalahkan Jepang, AS dibawah kepemimpinan Roosevelt bertemu dengan Churchill untuk membentuk aliansi yang diantaranya ada Inggris, China dan Uni Soviet. Ini termasuk rencana awal Churchill untuk menyerbu Afrika Utara (disebut Operation Gymnast) dan rencana utama para jenderal AS untuk invasi Eropa barat, yang difokuskan langsung pada Jerman (Operation Sledgehammer). Kesepakatan juga dicapai untuk komando terpusat di teater Pasifik yang disebut ABDA (Amerika, Inggris, Belanda, Australia) untuk menyelamatkan Cina dan mengalahkan Jepang. Namun demikian, strategi Atlantic First masih utuh, sangat memuaskan Churchill. Pada tahun 1942, Churchill dan FDR mengeluarkan "Deklarasi oleh PBB", yang mewakili 26 negara yang menentang Pakta Tripartit Jerman, Italia, dan Jepang. (Burns, 1970)

Dalam diplomasi publiknya pada perang dunia II, AS mendorong kebijakan militarism untuk kepentingan negaranya dan mengalahkan Jepang. AS melibatkan seluruh elemen militernya untuk digunakan dalam perang dunia II dan membantu negara sekutu untuk mengalahkan Jerman dan Jepang. Selain itu, AS menggunakan media radio untuk melakukan propaganda dan menjatuhkan lawan. Dengan menyebarkan berita- berita buruk serta menimbulkan

kekecawaan pada musuh. Kemenangan AS dan Sekutu atas Jerman ditandai dengan keberhasilan pasukan AS dalam merebut beberapa pangkalan militer Jepang. Serta kebijakan AS untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah dalam PD II dengan hasil keputusan Horito yang di siarkan melalui radio.

Berbagai upaya yang dilakukan AS untuk mengakhiri PD II dengan melakukan hubungan diplomatik melalui berbagai pertemuan dan konferensi. AS mengadakan konferensi besar bersama negara sekutunya untuk melakukan strategi mengakhiri perang ini. Berakhirnya perang dunia II ditandai dengan konferensi postdram pada 2 Agustus 1945 yang merupakan perjanjian negara- negara sekutu dengan Jerman atas pemabagian wilayah Jerman. Di Jepang ada perjanjian san francisco pada 8 Desember 1951 yang berisi pengawasan wilayah Jepang atas AS dan juga Jepang harus mengganti rugi atas perang dunia II terhadap sekutu.

Setelah 1945, AS melakukan berbagai upaya perdamaian politik luar negari dengan melaksanakan kebijakan Franklin Roosevelt untuk mendirikan organisasi internasional baru yang akan jauh lebih efektif daripada Liga Bangsa-Bangsa yang lama, dan menghindari kekurangannya. AS berhasil mensponsori pembentukan PBB. Organisasi ini mencirikan periode antar perang telah berakhir untuk selamanya. Amerika Serikat adalah kekuatan utama dalam mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, menjadi tuan rumah pertemuan lima puluh negara di San Francisco. (Leuchtenburg, )

### **3. Diplomasi Publik AS Masa Perang Dingin.**

Berakhirnya perang dunia II merupakan sebuah sejarah baru bagi Amerika Serikat. Kemenangan atas Jepang pada perang dunia II menjadikan AS sebagai negara kekuatan dunia. Pasca perang dunia II AS dihadapi dengan konflik ideologi.

Munculnya Uni Soviet mempengaruhi seluruh tatanan masyarakat dunia dan menghantarkan masyarakat dunia pada pertarungan berikutnya. Perang dingin ditandai dengan konflik ideologi antara AS dan Uni Soviet. Amerika Serikat yang menganut ideologi atau paham demokratis dan kapitalis, sedangkan Uni Soviet menganut ideologi komunis. (Rafferty, 2008)

Kedua negara tersebut berlomba- lomba dalam menyebarkan ideologi ke negara lain dengan menggunakan pendekatan *softpower*. Berbeda pada saat perang dunia I dan II, yang mana negara- negara yang konflik mengerahkan pasukan- pasukannya untuk berperang secara fisik dan melibatkan senjata. AS dan Uni Soviet menggunakan *Softpower* dalam berlomba- lomba untuk menyebarkan ideologi kedua negara. Pendekatan *softpower* ini sangat memberi pengaruh yang lebih besar pada perkembangan dunia. (Garthoff, 1994)

Dalam upaya untuk menekan persebaran komunisme yang dilakukan oleh Uni Soviet, AS yang dibawah kepemimpinan Truman menerapkan empat kebijakan untuk membantu perekonomian negara- negara di Asia sebagai bentuk untuk tidak terpengaruhi oleh paham komunis. AS memberikan bantuan berupa kredit pinjaman dari perusahaan- perusahaan swasta AS. (Towle, 2000) Selain itu pada tahun 1947, AS juga menerapkan *Containment Policy* yang dicetuskan oleh George Kennan sebagai diplomat AS. *Containment Policy* bertujuan untuk menahan ekspansi komunisme secara masif. Kemudian pada tahun 1949, AS membentuk lembaga NATO dengan tujuan untuk menghalangi paham komunisme yang mulai masuk di negara- negara Eropa Barat. AS melakukannya dengan mengajak negara- negara tersebut untuk menandatangani sebuah perjanjian yang secara tidak langsung mengancam keamanan Uni Soviet. (Rockwood, 1995)

Selain itu, aktivitas diplomasi publik AS pada perang dingin mencakup pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. (Tuch H. N., 1990) Pada tahun 1948 AS mengeluarkan *Smith-*



*Mundt Act* sebagai langkah AS untuk menyebarkan informasi tentang pemahaman baik AS kepada seluruh masyarakat dunia dan juga memperluas jaringan kerjasama yang baik dengan negara- negara di dunia. *Smith- Mundt Act* ini digunakan sebagai acuan dalam terbentuknya *United States Information Agency* (USIA) yang berperan sebagai sarana pemerintah dalam melaksanakan berbagai aktivitas atau kegiatan diplomasi publiknya. (Tuch H. N., 1990)

USIA bertujuan untuk memberikan informasi mengenai fakta yang sesungguhnya mengenai kondisi suatu negara dengan cara- cara komunikasi yang obyektif. Hal tersebut dapat dicapai dengan (Rachmawati, 2016) :

1. Menjelaskan kepada warga negara lain tujuan dan kebijakan dari pemerintah AS
2. Menanamkan ide imajinatif mengenai hubungan antara kebijakan AS dan aspirasi masyarakat dunia
3. Menghindarkan upaya- upaya yang mengancam tujuan dan kebijakan AS
4. Membatasi/ melindungi aspek- aspek penting kehidupan dan budaya masyarakat AS dengan memberikan pemahaman/ pengertian mengenai kebijakan dan tujuan pemerintah AS kepada masyarakat internasional.

VOA dan REF sangat kerap sekali digunakan ketika pada masa perang dingin terjadi. Hal tersebut dinilai efektif sebagai media untuk diplomasi. Dalam bukunya, Tuch menilai bahwa efektivitas VOA maupun REF terletak pada media yang digunakan saat itu yaitu radio. Menurutnya, radio memiliki beberapa kelebihan yang dinilai sangat efektif sebagai sarana yang digunakan dalam diplomasi publik. (Tuch H. N., 1990) Dan kelebihan ini tidak dimiliki oleh media lainnya. Beberapa kelebihan radio tersebut ialah (Tuch H. N., 1990):

1. Radio merupakan satu- satunya media yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi langsung ke penerimanya atau pendengar tanpa adanya perantara atau pihak lain yang dapat mempengaruhi isi informasi tersebut.
2. Gelombang radio dapat ditangkap dengan mudah meskipun ada tindakan atau usaha untuk merusak/ mengganggu akses pemberitaan informasi kepada pendengar.
3. Akses yang dimiliki radio sangat luas dan dapat mengakses ke seluruh daerah- daerah di suatu negara.
4. Radio juga mempunyai kelebihan yang dapat dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan membaca atau buta huruf.

Kelebihan yang dimiliki radio diatas membuktikan adanya kekuatan yang dimiliki oleh VOA dan REF dalam menyampaikan informasi dengan baik. VOA dan REF juga dapat memberikan informasi dengan menjangkau penduduk di berbagai daerah maupun negara. Penyampaian informasi juga disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah suatu negara yang dituju. Sehingga seluruh penduduk daerah disuatu negara tersebut dapat menerima informasi yang disampaikan dengan baik dan benar.

USIA telah menyebarkan informasi selama 46 tahun dan menjadi wakil AS dalam pergaulan dunia melalui informasi, budaya, dan program seni serta berita yang berskala internasional yaitu VOA. Kemudian melakukan publikasi dengan cara mendirikan perpustakaan, program penyebaran ide dengan pidato dan pameran. Dalam perjalananya, USIA mengalami beberapa perubahan dalam aktivitas diplomasi publiknya. Salah satunya ialah terjadinya tumpang tindih program antara informasi dan budaya. Yang hal tersebut mengakibatkan program pendidikan dan budaya tidak lagi menjadi wewenang dari USIA. Program pendidikan yang seharusnya berada dalam naungan USIA, maka pada akhirnya

diletakkan pada biro *international Educational Exchange Service* Kementerian Luar Negeri AS. (Rachmawati, 2016)

Setelah dipisahkannya program pendidikan dan budaya dari USIA, terjadi perdebatan panjang mengenai diplomasi publik AS kedepannya. Pada tahun 1963, Presiden John F. Kennedy melakukan tindakan dengan mengirimkan sebuah memorandum yang berisi USIA semata-mata bertugas untuk mempengaruhi publik di luar negeri dalam rangka untuk mendukung kebijakan dan arah politik luar negeri AS. Namun, direktur USIA menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa USIA tidak lagi sebagai alat publikasi pemerintah AS media. Akan tetapi USIA merupakan institusi yang mempunyai peran lebih besar dalam memberikan pertimbangan kepada presiden, juga penasihat psikologis terkait dengan opini publik. (Rachmawati, 2016)

Barbare white yang juga peneliti USIA, memberikan rekomendasi supaya USIA kembali disatukan lagi dengan biro Pendidikan dan Budaya Kementerian Luar Negeri. (Fitzpatrick, 2010) Menanggapi usulan tersebut, pada tahun 1978 Presiden Jimmy Carter menyatukan kembali program pendidikan dan Budaya ke dalam USIA. Dan juga Presiden Jimmy Carter menambahkan urusan domestik ke dalam institusi ini dan diberi nama *International Communication Agency* (ICA). ICA mempunyai tujuan sebagai berikut (Rachmawati, 2016):

1. Memberikan informasi kepada masyarakat dunia mengenai kebijakan AS yang fokus terhadap perbedaan kebudayaan dan kebebasan individu
2. Memberikan informasi kepada masyarakat AS dapat memperkaya pengetahuan budaya mereka untuk masyarakat negara lain

Dalam menjalankan tujuan tersebut, maka para diplomat diharuskan :

1. Dapat memperkuat hubungan antarnegara melalui pertukaran pelajar dan budaya serta memberikan bantuan pendidikan.
2. Memberikan akses informasi kepada masyarakat internasional mengenai kebijakan luar negeri AS.
3. Dapat membantu pemerintah AS dalam memberikan informasi mengenai isu dunia internasional sebagai sarana dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS
4. Membantu dalam merancang dan menyelenggarakan kebijakan nasional dalam dunia internasional melalui pembentukan design informasi dan komunikasi yang baik.
5. Sebagai negosiator dalam program pertukaran budaya dengan negara lain.

Ketika era pemerintahan Ronald Reagan terjadi perubahan terhadap USIA. Pada perubahan tersebut, USIA lebih ditekankan kepada promosi kebijakan luar negeri AS di luar negeri. Pada masa Reagan, misi diplomasi publik AS yaitu (Rachmawati, 2016) :

1. Memperkuat pemahaman publik internasional serta mendukung kebijakan AS
2. Memberikan masukan kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan anggota Dewan Keamanan Nasional mengenai opini publik internasional.
3. Mempromosikan dan mengelola program pertukaran pendidikan dan budaya sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat internasional dalam memahami budaya dan nilai yang dimiliki oleh AS.
4. Menanggulangi informasi yang bertujuan untuk mendistorsi tujuan dan kebijakan AS

5. Bekerjasama dengan institusi swasta di AS dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan tujuan diplomasi Publik AS.
6. Membentuk merumuskan kebijakan yang baik di tengah arus informasi yang semakin terbuka.
7. Menyelenggarakan negosiasi bagi kepentingan pendidikan dan pertukaran budaya dengan negara lain.

Dalam kerangka organisatoris USIA badan yang terpisah Kementerian Luar Negeri AS. Keberadaan USIA menjadi sangat penting bagi AS sebagai institusi yang digunakan untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat internasional, mempromosikan kepentingan dan keamanan nasional serta mempengaruhi opini publik internasional. Pada tahun 1999, Pada masa pemerintahan Clinton melalui the *Foreign Affairs Reform and Re-structuring Act* tahun 1998 akhirnya USIA resmi di tutup. Pada 1 Oktober 1999, biro informasi dan budaya pada USIA dipindahkan sebagai biro baru dalam Kementerian Luar Negeri, yaitu *International Information Programs, Public Affairs dan Educational and Cultural Affairs* langsung di bawah *Unde Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs*. (Rachmawati, 2016)

Berakhirnya era kepemimpinan Bill Clinton pada tahun 2000, yang mana kepemimpinan AS dilanjutkan oleh Presiden George W. Bush. Pada periode kepemimpinan George W. Bush terdapat peristiwa besar yang menyebabkan kebijakan dalam negeri dan luar negeri Amerika mengalami perubahan besar. Dan hal tersebut sangat berpengaruh pada arah dan strategi diplomasi publik AS pada era Bush. Sehingga pada bagian berikutnya akan menjelaskan secara khusus tentang kepemimpinan Bush.

Pada era George Bush merupakan era munculnya internet dan teknologi informasi. Era tersebut mengalami pertumbuhan akses informasi melalui internet sehingga memudahkan

pemerintah untuk memobilisasi informasi sebagai media untuk menjalankan diplomasi publik AS.

## **B. Diplomasi Publik AS Massa Presiden George Bush**

Diplomasi publik pada era Bush memiliki karakter yang berbeda dari Presiden- presiden sebelumnya. Pada era Bush diplomasi AS lebih terlihat mengedepankan *hard diplomacy*. Hal tersebut dilihat dari berbagai kebijakannya dalam mengatasi peristiwa 9/11 yang menimpa AS. Yang mana tragedi tersebut merugikan AS baik secara nasional maupun global. Dalam diplomasi publik AS pada era bush penulis membagi 2 sub penjelasan terkait diplomasi publik AS. Yang pertama menjelaskan mengenai Peristiwa WTC yang mengakibatkan menurunnya citra AS terhadap publik. Lalu yang kedua menjelaskan strategi diplomasi bush dalam mengatasi persoalan citra AS tersebut.

### **1. Peristiwa WTC menurunkan citra AS**

Terpilihnya Presiden George Bush sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke 41 mendapat sambutan dengan tragedi yang menyerang gedung World Trade Center (WTC) dan Gedung Pentagon di Washington DC pada 11 September 2001. Peristiwa 11 September 2001 merupakan sebuah tragedi yang sangat mengejutkan dunia internasional. Saat itu terjadi ledakan bom teror di gedung *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon. Teror bom tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Al- Qaeda yang disebut teroris. (Kean, 2002) Peristiwa yang terjadi di gedung WTC mengakibatkan meninggalnya 2.753 orang yang pada saat itu pesawat American Airlines Flight 11 dan United Airlines Flight 175 menabrak menara gedung WTC. Korban merupakan para pegawai bangunan dan juga pengunjung WTC. Peristiwa yang terjadi di Pentagon menewaskan 184 jiwa yang pada saat itu American Airlines Flight 77 menabrak gedung Departemen Pertahanan AS. (Kedang, 2017)

Akibat peristiwa itu, AS mengalami kerugian pada sektor ekonomi sebesar US\$ 123 miliar selama kurang lebih 2- 4 minggu setelah pemboman gedung WTC. Selain itu, AS juga mengalami kerugian pada infrastruktur kereta bawah tanah sebesar US\$ 40 miliar. Kemudian membayar asuransi akibat tragedi 9/11 sebesar US\$ 9,3 miliar. AS menghabiskan dana mencapai US\$ 750 juta untuk membersihkan bekas runtuhannya gedung WTC dengan membersihkan 1,8 juta ton puing- puing. (Kedang, 2017)

Presiden George Bush merespon peristiwa ini dengan menyatakan perang terhadap teroris yang merupakan pelaku dari bom teror. Deklarasi war on terror sangat jelas disampaikan oleh Presiden George Bush dalam pidatonya pada 20 September 2001. Dalam pidatonya Bush menyampaikan :

*“Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them. Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated”*  
(Kedang, 2017)

Deklarasi *war on terror* mendapatkan respon yang sangat cepat dari masyarakat internasional. Sehingga menimbulkan pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat internasional. *War on terror* merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Presiden Bush bertujuan untuk mempengaruhi negara- negara lain untuk -terlibat dalam kerja sama perang melawan teroris. Banyak negara- negara yang menolak kebijakan ini karena dapat menyudutkan negara- negara Islam yang diduga pelaku terorisme tersebut. Namun, Presiden George Bush tetap melaksanakan kebijakan war on terror sebagai upaya melawan terorisme akibat kejadian 9/11.

Dalam kebijakan war on terror yang diinisiasi oleh George Bush, terdapat tiga agenda utama dalam memerangi pelaku teror yang merugikan AS. Agenda tersebut yaitu membentuk *USA Patriot Act dan Homeland Security, Counter terrorism, US National Security Strategy*. Pertama, membentuk *USA Patriot Act dan Homeland Security*. *USA Patriot Act* merupakan UU yang dibuat oleh Pemerintah AS untuk memberikan tugas dan wewenang kepada seluruh pejabat AS untuk memerangi dan mengatasi terorisme. Pemerintah AS melakukan ini dengan cara memberikan izin untuk melakukan penyadapan telepon, rekaman, dan juga komputer. Selain itu, Pemerintah AS juga memberikan akses kepada instansi pemerintahan untuk mengawasi produk- produk rumah sakit dan juga buku- buku dari perpustakaan. Kemudian ada *Homeland Security*, yang merupakan sebuah Departement baru yang bertujuan untuk melindungi warga AS dari ancaman dan serangan terorisme. (The Department of Justice, t.thn.)

Agenda kedua ialah *Counter terrorism*. *Conter terrorisme* ialah suatu strategi baru yang dicetuskan oleh AS dalam mencegah dan menyerang gerakan terorisme akibat peristiwa 9/11. Yang ketiga ialah *US National Security Strategy*. Dalam agenda ini, terdapat dokumen yang berisi mengenai pernyataan perang oleh Presiden Geoge Bush kepada gerakan terorisme. Dalam dokumen tersebut, terdapat konsep pre-emption yang berfokus terhadap serangan terorisme dan penyebaran senjata pemusnah massal. Konsep pre-emption juga sebagai strategi AS melakukan tindakan offensif sebelum musuh menyerang. (Winingsih, 2009)

Selain itu, Presiden Bush mencetuskan kebijakan The Use Act (The Uniting and Stenghtening America by Providing Appropriate Tools Recuired to Intercept and Obstruct Terrorism Act) yang mana memberikan tugas dan tanggung jawab kepada lembaga eksekutif agar menahan para imigran yang dicurigai terlibat melakukan aksi terorisme. Hal ini menimbulkan kecaman bagi keamanan AS sehingga mengancam kebebasan dan kemerdekaan masyarakat AS, terutama minoritas umat



Muslim yang pelaku aksi 9/11 merupakan kelompok Muslim Al- Qaeda. Oleh sebab itu, timbulah sentimen bahwa Muslim adalah pelaku terorisme.

Dalam melaksanakan kebijakannya tersebut, Presiden George Bush melakukan diplomasi dengan menggunakan kekuatan ekonomi dan militer. (Mubah, 2007) Dengan memanfaatkan kekuatan militer, pada era Presiden George Bush anggaran militer AS mengalami peningkatan sebesar \$3,786 triliun, yang mana kenaikan anggaran tersebut terjadi pada tahun 2001- 2008. Untuk kebijakan war on terror, AS mengeluarkan anggaran sebesar \$768,3 milyar. (FY, 2001-2017)

Presiden George Bush melakukan kebijakan counter terorisme dengan menggunakan bantuan militer dan ekonomi untuk dimobilisasikan kepada negara- negara lain. Dengan tujuan untuk melaksanakan kampanye terhadap negara- negara lain yang berpotensi memiliki kasus terorisme dan juga potensi berkembangnya isu terorisme. Dalam segi ekonomi, Presiden Bush menggunakan *carrots* yang merupakan bentuk bantuan ekonomi AS yang sebelumnya mengalami embargo, termasuk Indonesia.

Pada era Presiden George Bush, AS fokus menggunakan *hard diplomacy*. Hal tersebut dilihat dari kebijakan-kebijakannya yang sangat kontroversial dalam memengarangi terorisme akibat peristiwa 9/11. Salah satu bentuk dari penggunaan *hard diplomacy* itu ialah dengan mengedepankan kekuatan militer dalam politik luar negerinya. Terlihat dari berbagai kebijakan yang ia jalankan dalam mencapai kepentingan nasional AS.

Akibat Kebijakan tersebut, AS dianggap selalu menyerang dan menuduh islam sebagai provokator dari tragedi 9/11. Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Vivien Walker yang disimpulkan dari Pew Global Attitude Project, menemukan bahwa 82% penduduk palestina memiliki pandangan negatif

mengenai Amerika, Yordania 74%, Mesir 70%, Turki 69% dan Pakistan 68%. Dari hasil riset ini, Vivien Walker menyimpulkan bahwa banyak orang yang tidak terlalu menyukai kebijakan AS. (Walker, 2012)

Kemudian dalam riset yang dikeluarkan oleh Pew Research Center for the people and the press, yang merupakan sebuah lembaga independen di Amerika menyebutkan bahwa 7 dari 8 negara yang disurvei berpendapat bahwa politik luar negeri AS berdampak buruk terhadap negaranya sendiri.

## **2. Diplomasi Publik Amerika Serikat Pasca Peristiwa 9/11.**

Semenjak peristiwa 11 September 2001, wajah AS mengalami sentimen negatif akibat Presiden George Bush mengambil tindakan yang represif dan merugikan dunia Islam dan juga AS tersendiri. Sehingga citra AS memburuk dimata dunia terutama negara- negara Islam dan kawasan timur tengah. Buruknya citra AS disebabkan adanya kebijakan Presiden George Bush untuk memerangi pelaku Bom Gedung WTC kepada umat Islam. Sehingga muculah pandangan Islamopobia.

## Gambar 2.1

### *Pandangan negara- negara tentang Amerika Serikat*

Favorable Views of the U.S.								
	1999/ 2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	%	%	%	%	%	%	%	%
Britain	83	75	70	58	55	56	51	53
France	62	62	42	37	43	39	39	42
Spain	50	--	38	--	41	23	34	33
Germany	78	60	45	38	42	37	30	31
Poland	86	79	--	--	62	--	61	68
Russia	37	61	37	46	52	43	41	46
Turkey	52	30	15	30	23	12	9	12
Lebanon	--	36	27	--	42	--	47	51
Egypt	--	--	--	--	--	30	21	22
Jordan	--	25	1	5	21	15	20	19
South Korea	58	52	46	--	--	--	58	70
India	--	66	--	--	71	56	59	66
Japan	77	72	--	--	--	63	61	50
Australia	--	--	59	--	--	--	--	46
China	--	--	--	--	42	47	34	41
Indonesia	75	61	15	--	38	30	29	37
Pakistan	23	10	13	21	23	27	15	19
Brazil	56	51	35	--	--	--	44	47
Mexico	68	64	--	--	--	--	56	47
Argentina	50	34	--	--	--	--	16	22
Tanzania	--	53	--	--	--	--	46	65
Nigeria	46	76	61	--	--	62	70	64
South Africa	--	65	--	--	--	--	--	60

1999/2000 survey trends provided by the Office of Research,  
U.S. Department of State.

Pada gambar diatas yang memperlihatkan presentase padangan suatu negara terhadap AS. Kepuasan terhadap kebijakan As selama era Bush selalu turun. Dimulai ketika pasca peristiwa 11 September 2001 menunjukkan bahwa image AS turun dibanyak negara. Kemudian pandangan positif AS juga menurun di 26 dari 33 negara pada tahun 2002 dan 2007. Pada tahun 2006 terdapat 13 responden dari 15 negara mengungkapkan bahwa kehadiran Amerika di Irak bahaya yang sama dan mengganggu stabilitas Timur Tengah dari pada rezim Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Sementara 11 menilai ancaman terhadap stabilitas timur tengah lebih besar daripada konflik Israel-Palestina. (PewResearchGlobal, 2008)

Dan sementara perang yang dipimpin AS melawan terorisme pada awalnya mendapat dukungan kuat di antara sekutu-sekutu AS di Eropa, dalam beberapa tahun terakhir sikap dunia terhadap operasi militer Amerika di Afghanistan telah menjadi semakin negatif. Sekarang dalam survei terbaru, mayoritas di hampir semua negara berpikir sudah waktunya bagi Amerika untuk menarik diri dari Irak dan Afghanistan. (PewResearchGlobal, 2008)

Dalam survey yang dilakukan oleh Pew Research Global mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan adanya sifat atau pandangan tentang anti American di beberapa negara terutama pada negara Islam. Pertama, pandangan mengenai anti American bukan hanya terjadi di Eropa melainkan atas kebencian negara- negara timur tengah kepada Amerika. Dalam jajak pendapat dari 44 negara yang dilakukan pada tahun 2002, menemukan citra Amerika turun menjadi peringkat tujuh dari delapan negara Amerika Latin yang di survey. Kemudian pada tahun 2006 survei mengungkapkan penurunan di Jepang dan India, yang mana dua kekuatan Asia yang relatif masih pro-Amerika. Kedua, anti-Amerikanisme merupakan fenomena global, dan paling kuat di dunia Muslim. Pada tahun 2006, di semua lima negara mayoritas Muslim kurang dari sepertiga dari mereka yang disurvei memiliki pandangan yang menguntungkan AS. Terlebih lagi, dengan perang Irak, anti-Amerikanisme menyebar ke bagian-bagian dunia Muslim di mana AS sebelumnya relatif populer. Di Indonesia, misalnya, antara tahun 2002 dan 2003 peringkat kesukaan Amerika turun dari 61% menjadi hanya 15%. Di Turki turun dari 52% pada akhir 1990-an menjadi 15% pada 2003. Sebuah studi 2005 Pew menemukan bahwa di semua lima negara mayoritas Muslim yang disurvei, mayoritas yang kuat mengatakan mereka khawatir bahwa AS akan menjadi ancaman militer bagi negara mereka. (PewResearchGlobal , 2007)

**Gambar 1.2**

***Pandangan Negara- negara terhadap AS dalam perdamaian dunia***

<b>Dangers to World Peace</b>				
<i>% saying 'great danger'</i>	<u>Iran</u>	US in <u>Irag</u>	North <u>Korea</u>	Israeli- <u>Palestinian conflict</u>
U.S.	%	%	%	%
Great Britain	34	41	19	45
France	31	36	16	35
Germany	51	40	23	51
Spain	38	56	21	52
Russia	20	45	10	41
Indonesia	7	31	4	33
Egypt	14	56	14	68
Jordan	19	58	18	67
Turkey	16	60	6	42
Pakistan	4	28	8	22
Nigeria	15	25	11	27
Japan	29	29	46	40
India	8	15	6	13
China	22	31	11	27

Ketiga, di antara banyak orang, anti-Amerikanisme adalah pendapat yang sangat kuat, yang membuatnya sulit untuk diubah. Jajak pendapat Uni Eropa pada tahun 2003 bahwa 53% orang di negara-negara Uni Eropa menganggap AS sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. Secara mengejutkan, orang Eropa cenderung mengatakan ini tentang AS seperti halnya mereka mengatakan tentang Iran dan Korea Utara. Ciri keempat anti-Amerikanisme adalah bahwa tidak lagi hanya AS sebagai negara yang dianggap negatif, tetapi juga semakin

meningkatkan rakyat Amerika merupakan suatu tanda bahwa pendapat anti-Amerika semakin dalam dan semakin mengakar. Di negara-negara seperti Spanyol, Yordania, Indonesia, dan Turki, pandangan baik orang Amerika telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. (PewResearchGlobal, 2007)

Munculnya sikap anti Amerikanisme juga mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat. Salah satu dampaknya ialah adanya boikot produk Amerika di berbagai negara, terutama negara yang memiliki populasi Muslim terbanyak. Di Indonesia contohnya, boikot produk Amerika muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Kompas.com, 2008) Boikot produk Amerika juga ditunjukkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Timur dengan melakukan aksi terhadap restoran asal Amerika yaitu Burger King, McDonald's dan juga KFC. Aksi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya warga sipil Indonesia untuk mendesak Pemerintah Indonesia untuk memboikot produk AS secara nasional. (Suparman, 2014)

Pemboikotan produk AS tidak hanya dilakukan di Indonesia, melainkan Malaysia juga melakukan hal serupa untuk memboikot produk AS di Malaysia. LSM di Malaysia melakukan kampanye untuk memboikot produk AS yakni McDonald's, Starbucks, dan juga Coca-cola. Mereka melakukannya dengan menyebarkan pesan-pesan melalui bendera yang mereka gunakan. (Salam-Online.com, 2014)

Akibat kebijakan yang dicetuskan oleh Presiden George W. Bush AS mengalami penurunan citra di mata internasional, terutama di Negara-negara Muslim. Sebagai upaya untuk mengatasi problem tersebut, Amerika Serikat yang dipimpin oleh George Bush menjalankan diplomasi publiknya dengan menggunakan instrumen media massa. Setelah peristiwa pasca 9/11 tersebut media massa merupakan sarana yang sangat penting untuk digunakan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Gillion bahwa diplomasi publik merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam mencapai kepentingan

nasional negara tersebut melalui *understanding, informing, dan influencing foreign audiences*. (Public Diplomacy Alumni Association, 2017)

Media massa dalam hal ini publikasi, radio, dan TV merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk opini publik serta dapat mempengaruhi pikiran masyarakat. Perkembangan informasi dan komunikasi merupakan salah satu tanda adanya pergeseran pandangan yang tradisonal mengenai pembentukan citra baik hanya bisa dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah. Suatu negara tidak dapat melakukan propaganda dalam memanipulasi realitas. Sebab, citra dan realitas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Dalam memperbaiki citra, terlebih dahulu harus memperbaiki realitas yang ada. Media massa menjadi instrumen yang dapat memperbaiki citra suatu negara dengan realitas yang ada.

Media massa yang digunakan AS dalam penyiaran berita dengan tujuan untuk mempengaruhi pikiran dan membentuk opini publik yaitu ialah VOA. VOA merupakan media resmi milik pemerintah AS untuk menyebarkan berita ke seluruh penjuru dunia melalui televisi, radio, dll. VOA mendapat dukungan dan perlindungan yang kuat dari pemerintah AS. Hal tersebut dicantumkan pada prinsip- prinsip yang VOA yakni (Governors, t.thn.) :

- VOA akan secara konsisten menayangkan berita secara akurat, dan komprehensif.
- VOA akan mempresentasikan AS secara jelas, efektif dan juga membuka diskusi bagi opini mengenai kebijakan pemerintah.
- VOA juga akan mempresentasikan berita tidak hanya mengenai masyarakat Amerika tapi juga institusinya.

VOA merupakan media resmi AS yang merupakan cikal bakal dari USIA atau (*United States Information Agency*).

USIA merupakan suatu badan yang awalnya mempunyai tugas untuk melakukan propaganda terhadap liberalisme yang melawan komunis ketika perang dingin. Dalam proses perkembangannya VOA muncul dengan manajemen *broadcasting* yang mana sebelumnya didirikan oleh CIA. (Malcolm S. Forbes, 1993)

Pada perang dingin, VOA digunakan oleh Pemerintah AS untuk melakukan penyebaran informasi melalui saluran Radio. Yang mana saat itu media komunikasi radio sangat intensif digunakan oleh negara- negara untuk menyebarkan informasi mengenai perang dingin. Pada era George Bush, VOA mengalami perkembangan yang sangat signifikan. VOA yang dulunya dibawah naungan USIA, kini menjadi saluran informasi yang independen dibawah naungan lembaga *Broadcasting Board Governors* (BGC). VOA memiliki tujuan sebagai media yang mampu memberikan sudut pandang bagi Pemerintah AS. Dengan hal ini VOA mampu memberikan informasi tentang nilai positif Pemerintah AS untuk mempengaruhi persepsi publik. (Irawan, 2015)

Dalam era Presiden George W. Bush, VOA melakukan kerjasama dalam menyiarkan tayangannya di stasiun TV di berbagai negara termasuk di negara- negara Asia terutama Indonesia. VOA juga menjangkau wilayah- wilayah Timur Tengah dalam rangka untuk menyiarkan peristiwa- peristiwa penting di AS dan juga di kawan itu sendiri. VOA menjangkau wilayah- wilayah Timur Tengah dengan memberikan berita menggunakan bahasa Arab, Dari, Parsi, Pashto, dan Urdu. VOA juga melakukan survey di Kawasan Afghanistan mengenai pendengar VOA di negara tersebut. Dalam hasil survey tersebut memperkirakan 80% pria dewasa di Afghanistan menjadi pendengar VOA dan menghargai informasi yang sifatnya objektif. Siaran yang dilakukan oleh VOA di negara Timur Tengah seperti Afghanistan, Irak, dll dilakukan 24 jam. (Governors, t.thn.)



Selain VOA, AS juga menggunakan Cable News Network (CNN) untuk mempengaruhi pikiran publik. CNN merupakan televisi berita yang didirikan pada tahun 1980 oleh Ted Turner. CNN telah tersebar di 212 negara dengan tayangan yang dapat diakses selama 24 jam non stop. CNN dijadikan media yang bekerjasama dengan Pemerintah AS karena dapat mengikuti proses pengambilan keputusan pemerintah AS dalam waktu 24 jam.

Dalam sebuah artikel pada tahun 2005 mengenai dampak media massa dalam politik AS, Robinsen Piers menyatakan bahwa CNN ialah salah satu media yang digunakan AS sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negeri negaranya. CNN memberikan peran penting dalam mempengaruhi masyarakat internasional melalui penyiaran berita. (Gilboa, 2005) Selama pemerintahan Bush, AS berupaya untuk memperbaiki citra AS yang menurun pasca tragedi 11 September dengan memaksimalkan diplomasi publiknya untuk mendapatkan dukungan terhadap kebijakan luar negerinya.

Selain media massa, AS juga menyelenggarakan program pertukaran Pendidikan dan Budaya sebagai bentuk diplomasi publiknya dalam mempengaruhi opini publik internasional. AS memberikan program pendidikan dalam pertukaran budaya seperti *Fullbright*, *Humphrey Fellowship*, *International Visitor Program*, dan *Citizen Exchange*. Program ini pada awalnya dibentuk oleh pemerintah AS dengan sasarannya ialah negara-negara Islam dengan tujuan agar program- program ini dapat membangun dialog interaktif, pertukaran dan pemahaman tentang perbedaan budaya AS dan dunia Islam. Hal ini juga untuk mengurangi pandangan negatif AS di mata dunia terutama pada negara Islam.

Pada tahun 2005, Karen Hugles memimpin diplomasi publik Amerika. Dalam diplomasi publiknya Bush menghendaki agar diplomasi publik mampu membangun strategi jangka panjang untuk meyakinkan bahwa Amerika dapat mengembalikan nilai- nilai Amerika lebih baik dengan

warga dunia. Untuk mendukung hal tersebut, Hughes mencantumkan beberapa misi dalam diplomasi publik yaitu, Membantu perwujudan Presiden, melakukan isolasi terhadap ekstrimis untuk membantu perkembangan kebersamaan dalam kepentingan dan nilai- nilai diantara perbedaan agama dan budaya. Kemudian pada bulan juni 2007, ide tersebut dimasukkan dalam *National Strategy for Public Diplomacy and Strategic Communication* yang menjadi prioritas dalam diplomasi publik Amerika. Mengacu pada rencana tersebut yang mana publik domestik dan peran sebagai penasehat kebijakan luar negeri tidak termasuk didalamnya. Maka dari itu, diplomasi publik dikembalikan pada perannya yang paling awal yakni mengkomunikasikan pandangan AS, nilai serta kebijakannya secara efektif kepada masyarakat internasional. Dan juga diplomasi publik mampu menjadi penghubung bagi publik AS dan warga dunia lainnya. (Rachmawati, 2016)

Upaya yang dilakukan oleh Presiden George W. Bush dengan menggunakan media massa VOA dan CNN merupakan strategi dalam diplomasi publik AS. Dan dalam diplomasi publiknya juga memberikan program- program pelatihan dan pembiayaan pendidikan bagi negara- negara lain. Namun, upaya tersebut tidak memberikan efek yang baik bagi Pemerintah AS. Citra AS dan anti Amerikanisme tetap muncul di kalangan negara- negara Muslim di duina. Presiden George Bush telah menjabat delapan tahun sebagai Presiden AS tidak dapat mengembalikan Citra baik AS di dunia Inernasional.

*Pew Global Attitudes Projet* mengeluarkan hasil penelitiannya tentang dampak kepemimpinan Bush pada politik luar negeri AS tahun 2008. Terdapat 24 negara, yang mana mayoritas memilih tidak percaya dengan kebijakan politik luar negeri AS. Kemudian dalam Survey yang dilakukan oleh University of Maryland terhadap enam negara di Timur Tengah yakni Arab Saudi, Lebanon, Maroko, Mesir, Uni Emirat Arab dan Yordania mengungkapkan bahwa AS merupakan negara yang menjadi ancaman kepada negara- negara Arab. Hal tersebut dinilai akibat kebijakan George W. Bush mengenai

War on Terror yang terjadi di negara- negara Islam dan Timur Tengah. (Spencer, 2010)